

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG
MAKASSAR)**

**NAIMAH IKRAM
105730433813**



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG
MAKASSAR)**

**NAIMAH IKRAM
105730433813**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG MAKASSAR)

NAMA : NAIMAH IKRAM
NOMOR STAMBUK : 105730433813
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI/S1
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia Penguji Skripsi Strata (S1) pada hari Sabtu, 12 Februari 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 12 Februari 2018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muchran BL, SE., MS
NIP: 195608241989031001



Andi Arman, SE, M.Si, Ak.CA
NIDM. 0906126701

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 963078


Ismail Badollahi, SE., M.si, Ak.CA
NBM : 107 34 28

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama NAIMAH IKRAM , NIM 10573 04338 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK 17 Tahun 1439 H/ 2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Senin, 12 Februari 2018 M. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar.

26 Jumadil Awal 1439 H

Makassar,

12 Februari 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum: DR. H. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua: Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris: Drs. H. Sultan Sarda, SE., M.Si (.....)
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji:
 - a. Dr. Agussalim HR, SE.,MM (.....)
 - b. Andi Arman, SE., M.Si. Ak. CA (.....)
 - c. Muttiarni, SE., M.Si (.....)
 - d. Moh. Aris Passigai, SE., MM (.....)

MOTTO

“Seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya”

(HR. Al-Baihaqi)[5]

“Ilmu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir”

(Abdullah bin Abbas)

From nothing get something

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, keluarga serta teman-temanku yang telah banyak membantu saya dengan tulus hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Naimah Ikram 2017. “Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Tbk. Cabang Makassar)” SKRIPSI. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. H. Muchran BL ,SE., MS dan Pembimbing II Andi Arman, SE, M.Si.Ak.CA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar.

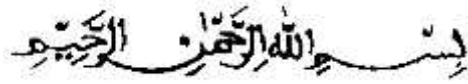
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis komparatif. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara prinsip *good corporate governance* dengan kinerja keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar.

Jumlah populasi penelitian sebanyak 80 pegawai dengan jumlah sampel sebanyak 44 pegawai dengan menggunakan rumus slovin dengan taraf 10%. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode angket dengan skala *likert*. Uji persyaratan analisis menggunakan Uji t. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat hubungan positif antara prinsip *good corporate governance* dan kinerja keuangan dibuktikan dengan nilai t (21,264) lebih besar dari tabel (2,018).

Kata Kunci: Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat taufiq dan kehadiran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar)

Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisannya, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. Oleh karena itu dalam kesempatan ini

izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr H Abd Rahman Rahim, SE,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.si.Ak.CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. H. Muchran BL, SE., MS Selaku pembimbing I dan Bapak Andi Arman, SE,M.Si.Ak.CA Selaku pembimbing II yang telah mendorong, membantu dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan Fakultas, Dosen Akuntansi yang pernah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis serta Staf pegawai dilingkungannya.
6. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Muh. Ikram dan Ibunda Tukiyeem yang telah memberi Motivasi, dukungan dan pengorbanan yang tiada hentinya kalian berikan. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu dan Allah SWT selalu menjaga kalian.
7. Teman-teman Angkatan 2013 yang saya banggakan
8. Ibu Uni di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang yang telah membantu saya dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Seluruh keluarga, rekan, dan sahabat yang kesemuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini semoga dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis maupun pada orang lain Insya Allah. Semoga Allah swt memberikan karuniaNya kepada Bapak, Ibu serta Saudara(i) atas segala bantuannya kepada Penulis, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 4 Oktober 2017

Penulis

Naimah ikram
105730433813

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Bank	10
a) Pengertian Bank	10
b) Pengertian Bank Syariah	10
2. <i>Agency Theory</i>	11
3. <i>Good Corporate Governance</i>	13

a) Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	13
b) Sejarah <i>Good Corporate Governance</i>	16
c) Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
d) Tujuan dan Manfaat Good Corporate Govenance.....	24
e) Faktor Penerapan Good Corporate Governance.....	25
f) Aspek Hukum Penerapan Good Corporate Governance.....	26
g) Good Corporate Governance Pada Bank	27
4. Kinerja Perusahaan	29
a) Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja	30
b) Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja.....	31
c) Penilaian Kinerja dengan Aspek Keuangan	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Definisi Operasional Variabel.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR OBJEK PENELITIAN	45
A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk.....	45

B. Visi dan Misi Organisasi.....	47
C. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia, Tbk	48
D. Struktur Organisasi	49
E. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan.....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahlu.....	35
5.1 Jenis kelamin.....	55
5.2 Umur	56
5.3 Uji T	57

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
4.1 Struktur Organisasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsep *corporate governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal). Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya *good corporate governance* permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi. (Hart dalam Sayidah, 2007)

Dalam teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini dapat menimbulkan konflik yang disebut *agency conflict*. Hal ini disebabkan pihak prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang saling bertentangan (Jensen dan Meckling, 1979). Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbukaan dari teori keagenan dalam mengatasi

keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk, 2000).

Manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas pemilik. Dengan informasi yang dimiliki manajerdapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengkorbankan kepentingan pemilik,sehingga informasi yang disampaikan kepada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sbenarnya (Ujiantho dan Pramuka, 2007). Richardson (dalam Ujianto dan Pramuka,2007) menerangkan bahwa kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric). Asimeytri antar manajemen (agent) dan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manjer untuk melakukan manajemen laba (earnings manegement).(Richardson, 1998)

Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik. (Menurut Dechow dalam siallagan dan Machfoedz,2006), manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan keuangan yang dibuatnya sendiri.hal inidiprediksi dapat menimbulkan manipulasi laba yang sering diartikan sebagai manejemen laba.

Istilah corporate governance ditemukan pertamakali pada tahun 1964 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya corporate governance –

Practices, Procedures, and Power In British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower. Perhatian terhadap corporate governance saat ini muncul sebagai akibat dari adanya skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan seperti Enron dan Worldcom. Lemahnya pelaksanaan corporate governance di perusahaan dianggap sebagai salah satu pemicu utama skandal tersebut.

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip Corporate Governance telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG: 2006).

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam konteks keislaman. Entitas syariah tentunya memiliki perspektif sendiri terhadap Good Corporate Governance yang tentunya merupakan cerminan dari perspektif Islam. Berkembangnya bisnis syariah dan Good Corporate Governance di Indonesia turut diikuti oleh

dikeluarkannya Konsep Pedoman Good Corporate Bisnis Syariah oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2011.

Kelahiran *Good Corporate Governace (GCG)* pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan *GCG* pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip *GCG* dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah . Penggantian ini disebabkan karena *GCG* yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan *GCG* yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah*

(pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militans syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah, Riska (2010).

Kinerja Keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah corporate governance. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 isu mengenai corporate governance telah menjadi salah satu bahasan penting dan menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010). Hal ini dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Cornett *et al* (2005) terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 100 indeks tahun 1993-2000, juga menunjukkan hasil yang sama dimana perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance* mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. Menurut Klapper dan Love (2002) dalam *Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Capital* tahun 1998-2001 menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Desna Arini (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peneapan prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan alasan karena dalam industri perbankan syariah di setiap kegiatan operasionalnya seperti penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya harus dinyatakan sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah yang dimaksud disini bahwa dalam kegiatan operasional bank syariah harus mendasarkan pada nilai-nilai syariah. Di dalam nilai-nilai syariah tersebut telah terkandung prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sehingga nilai-nilai syariah yang dimasukkan kedalam prinsip syariah diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku (Rifka, 2010).

Dengan kata lain, bank syariah akan menjadi semakin efektif dalam menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* yang efektif akan menciptakan praktik *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Kusuma dalam Ristifani, 2009).

Berdasarkan uraian dan bukti empiris yang telah dilakukan oleh penelitipeneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menguji “**Analisis**

Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya yang berkaitan dengan *good corporate governance*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Menambah referensi penelitian di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memperoleh dan menambah wawasan mengenai prinsip-prinsip GCG dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

c. Bagi Calon Investor

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan keputusan investasi secara cepat dan tepat serta menguntungkan di masa depan.

d. Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan patokan dalam mengelola kinerja keuangan bank syariah berdasarkan prinsip Good Corporate Governance

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bagian yang berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk

penelitian, dan perumusan hipotesis yang merumuskan asumsi hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum kantor objek penelitian seperti sejarah kantor, visi misi, tujuan berdirinya kantor, struktur organisasi, dan kegiatan usaha kantor.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang isi pokok dari keseluruhan penelitian yang mana menjelaskan analisis data dan pembahasan hasil penelitian

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

a) Pengertian Bank

Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b) Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana himpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah merupakan lembaga-lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, diantaranya prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya (Utami, 2003)

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa bank syariah adalah sistem perbankan yang didasari pada sistem syariah islam, yang didasarkan pada suatu perintah atau larangan islam.

2. Agency Theory

Konsep *agency theory* didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya Nuswandari (2009). Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. *Agency theory* terfokus pada dua individu pihak yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut. Agen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pihak pemilik (prinsipal) harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di amanahkan. Di lain pihak prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen.

Agency cost seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.

Adanya dua partisipan tersebut (principal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. (Nuswandari, 2009)

Menurut Macey dan O'Hara, (2003) menyatakan bahwa *Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak

mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

3. *Good Corporate Governance*

a) *Pengertian Good Corporate Governance*

Istilah “Corporate Governance” pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Dalam *Cadbury Report* yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. *Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal.

Good corporate governance menurut Bank Dunia adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Bacelius Ruru (2007) dalam Nur Hidayati (2010) memberikan pengertian GCG atau tata kelola usaha adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang

menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Corporate Governance (tata kelola perusahaan) merujuk pada seperangkat perusahaan di arahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lain (misalnya karyawan, pemasok dan masyarakat pada umumnya).

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2007) *corporate governance* dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari *corporate governance*. Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah ke perbaikan kinerja.

Berikut definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- b. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Good Corporate Governance terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (*Corporate Governance* internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari luar perusahaan (*corporate governance* eksternal perusahaan).

Corporate Governance internal perusahaan adalah unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan. Jika kinerja *corporate governance* internal perusahaan baik maka kinerja perusahaan pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur *corporate governance* internal perusahaan menurut Kresnohadi adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Manajer Karyawan Sistem dan Komite Audit.

Corporate Governance eksternal perusahaan adalah unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan diluar perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun unsur-unsur

Corporate Governance eksternal perusahaan menurut Kresnohadi adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, Investor, institusi penyedia informasi, Akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, memberi pinjaman dan pengesahan legalitas.

b) Sejarah *Good Corporate Governance*.

Sejarah *corporate governance* telah dimulai sejak 200 tahun yang lalu, yaitu ketika *Blackstone* menggambarkan *corporation* sebagai *little republic*. Dengan penganalogian seperti itu memberi konsekuensi bahwa suatu *corporation* harus dikelola sebagaimana suatu republik dan seringkali perusahaan disebut sebagai miniature Negara. Sehingga unsur pengelolaan sebuah perusahaan harus diselenggarakan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Pemilihan anggota *board of director* oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar pemegang saham.
2. Organ legislatif perusahaan yang merupakan sentral kewenangan manajerial.
3. Birokrasi perusahaan yang terdiri dari *board of director* dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan. Sistem *Corporate Governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Sistem *Corporate Governance* yang baik

memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman yang lebih dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Hal ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance*

c) Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Konsep *Good Corporate Governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan prinsip-prinsip yang menjadi indikator utama dari *good corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility*. Keempat prinsip tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara

konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Prinsip dasar dari *good corporate governance* (GCG), yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum, penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

Prinsip-prinsip Corporate Governance yang berlaku secara internasional (www.fcgi.or.id) meliputi:

- 1) Hak-hak pemegang saham, yang harus tepat waktu dan secara benar menginformasikan tentang perusahaan, yang harus dapat berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan mendasar perusahaan, dan siapa yang harus berbagi dalam keuntungan perusahaan.
- 2) Perlakuan yang setara pemegang bagi saham, khususnya pemegang saham minoritas dan asing, dengan pengungkapan penuh informasi material dan melarang self dealing dan insider trading.
- 3) Peran stakeholder harus diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan aktif bekerjasama antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan dan suara finansial perusahaan;

- 4) Pengungkapan tepat waktu dan akurat serta transparansi pada semua hal-hal material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder; dan
- 5) Tanggung jawab dewan dalam manajemen, pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

Zarkasyi (2008: 36) menyatakan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan-undangan. GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat pengguna produk dan jasa dunia usaha. Lebih lanjut Zarkasyi (2008: 36) memberikan penjelasan mengenai prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut.

- 1) Negara dan perangkatnya, peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten.
- 2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- 3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol secara obyektif dan bertanggung jawab.

Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Transparansi (*transparency*)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut *OECD* (2004) konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka (Wibowo, 2009).

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut *OECD* (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham

Linan dalam Hastuti (2005) berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini meliputi pengetahuan bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut *OECD* (2004)

responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

4. Kemandirian (*Independency*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, Kemandirian (*Independency*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau

pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

Menurut Luqman (2010) Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang objektif.
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko.

5. Kewajaran (*fairness*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *FCGI* prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan

minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*. Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

d) Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005), *Good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Menurut FCGI (2004) yang dikutip oleh Fitri (2008), manfaat *good corporate governance* adalah :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisien operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada satakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya pembiayaan yang lebih murah serta tidak rigit (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas terhadap kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.

Manfaat *good corporate governance* ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

e) Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* selalu memperhatikan berbagai macam faktor, termasuk hal-hal khusus ditiap negara. Belum adanya pedoman yang dapat secara aklamasi itu pada dasarnya disebabkan karena dua macam faktor. (*Sutojo dan Aldrige, 2005*). Pertama, sebagai disiplin ilmu, *good corporate governance* relatif masih baru. Seperti

disinggung di muka baru sejak awal decade 2000an konsep *good corporate governance* menjadi pusat perhatian masyarakat bisnis dan pemerintah di sebagian besar negara di dunia. Yang kedua, seperti diutarakan di atas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dipengaruhi banyak faktor intern dan faktor ekstern perusahaan di masing-masing negara. perlu menyusun suatu piagam (*charter*) tentang GCG yang dilengkapi dengan petunjuk operasional (juklak)-nya, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh para staf atau karyawan maupun manajemen perbankan.

f) Aspek Hukum Penerapan *Good Corporate Governance*

Perkembangan *corporate governance* lainnya yang menarik untuk diamati adalah mengenai hukum perusahaan, khususnya pengakuan perusahaan sebagai badan hukum. Pengakuan perusahaan sebagai badan hukum dengan tanggung jawab terbatas, ternyata baru dilaksanakan pada tahun 1855 di Inggris. Setelah itu berturut-turut beberapa negara di Eropa juga meloloskan ketentuan mengenai perusahaan sebagai badan hukum antara lain Perancis pada tahun 1863 dan Jerman pada tahun 1884. Pengakuan perusahaan sebagai badan hukum di Amerika Serikat diberikan pada tahun 1886. Perkembangan ini menandai era baru bentuk hukum perusahaan yang mengatur kehidupan perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri.

Dari perkembangan di atas, terlihat bahwa fungsi dari hukum perusahaan adalah (1) menyediakan bagi komunitas bisnis suatu pilihan bentuk hukum untuk menjalankan usahanya, (2) memberikan aturan hukum untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi di antara para konstituen perusahaan. Dengan perkataan lain mencoba secara maksimal menyusun ketentuan guna memenuhi keinginan terciptanya *check and balances* di antara konstituen perusahaan.

Dari sisi yang lain Stijn Claessen, Charles P. Oman, dan lain-lain melihat bahwa *corporate governance* mempunyai dua aspek :

1. Aspek perilaku korporasi dan sarasannya adalah peningkatan kinerja (*performance*).
2. Aspek normatif dari *corporate governance* dan sarasannya adalah kepatuhan (*conformance*).

g) Good Corporate Governance Pada Bank

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi

internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai etika (*ethics values*) yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Agar penerapan GCG di perbankan dapat berjalan dengan lancar, maka pihak perbankan perlu menyusun suatu piagam (*charter*) tentang GCG yang dilengkapi dengan petunjuk operasional (juklak)-nya, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh para staf atau karyawan maupun manajemen perbankan.

1. Aspek Khusus Penerapan GCG Pada Bank

Menurut Susilo (2007), beberapa pakar mengatakan terdapat kondisi spesifik pada bank yang mempunyai dampak dalam penerapan *corporate governance*. Dari segi operasional Ross Levine (2003, 2005) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu (1) industri perbankan relatif lebih kurang transparan (*opaque*) dibandingkan dengan industri lainnya karena adanya informasi asimetri, dan (2) intervensi regulator sangat tinggi dalam perbankan baik secara makro yaitu pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank.

2. Peringkat GCG

Menurut pihak Bank Indonesia dengan dibuatnya peringkat GCG perbankan tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan. Dalam hal ini, terdapat 4 (empat) hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian bagi BI dalam menentukan peringkat GCG perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait.
- b. Efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya.
- c. Efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris.
- d. Independensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

3. Kinerja Perusahaan

Menurut Hastuti (2005) kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan. Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidaknya terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan. Dari aspek keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dan sering menjadi perhatian utama bagi para pemakai informasi laporan keuangan. Sedangkan dari aspek non-keuangan bisa dilihat dari kepuasan nasabah ataupun perkerja, dan juga bisa dilihat dari perkembangan aktivitas bisnis perusahaan dan lain sebagainya.

a) Pengertian Kinerja Dan Penilaian Kinerja

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996 dalam Nuswandari, 2009).

Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non finansial yang lebih dititikberatkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja

perusahaan. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan rugi laba dan neraca (Purwaningtyas, 2011).

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

b) Tujuan Dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pada suatu organisasi sebaiknya menj adi syarat utama bagi penempatan sumber daya ketika akan melaksanakan kegiatan baru, memperhitungkan pendapatan dan biaya serta investasi sebuah proyek. Penilaian perusahaan khususnya kinerja sering dilakukan untuk tujuan :

1. Untuk memperoleh pendapat wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada di dalam neraca.
2. Untuk ekuitas dari masing-masing perusahaan.

3. Untuk kepentingan usaha, yang keperluan merger dan akuisisi, yaitu untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai bertujuan untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya.
4. Memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

c) Penilaian Kinerja Dengan Aspek Keuangan

Aspek keuangan menjadi perhatian dalam suatu perusahaan karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan.

Dalam upaya menilai kondisi perusahaan melalui tingkat kinerja serta melihat perkembangan suatu perusahaan, seorang analis keuangan memerlukan alat ukur untuk membantu pekerjaannya. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan suatu teknik analisis rasio, yaitu “suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut”.

B. Peneliti Terdahulu

Mappaselle (2013) dengan penelitian berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palopo). Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan observasi langsung ke lokasi penelitian. Secara parsial ini menunjukkan bahwa prinsip GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan prinsip independensi dan tanggung jawab tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Desna Arani (2010) dengan penelitian berjudul: Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menggunakan instrument kuesioner. Dalam menganalisis menggunakan analisis *rank spearman*.

Allina Addiyah (2014) Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Eko Sunarwan (2015) Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Entitas Perbankan di Bank Syariah (Studi

Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Metode yang digunakan *purposive sampling* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) . Sedangkan variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan diukur *Return On Asset* (ROA)

Rizky Amalia (2014) dengan penelitian berjudul: Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan teknik *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Dari hasil uji regresi linear berganda variabel syariah compliance (X1) dan audit review (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA (X1) dan ROE(X2) ROA dan ROE. Uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara keseluruhan.

Tabel 2.1

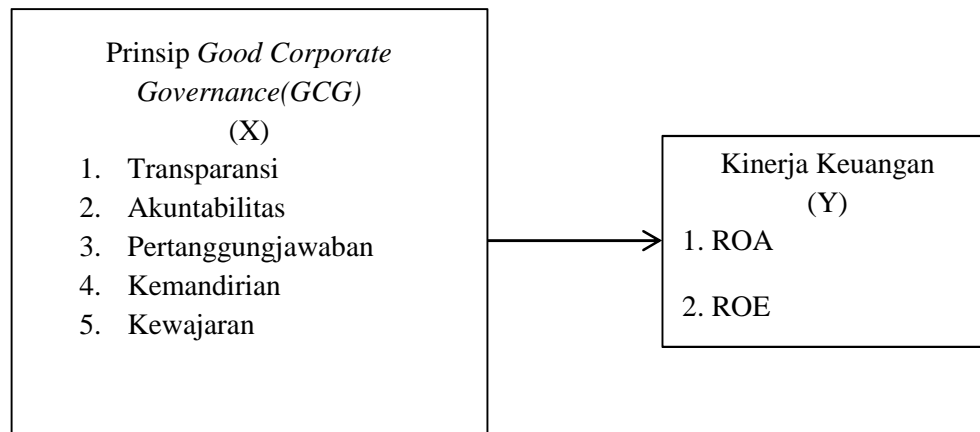
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mappaselle (2013)	Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palopo).	Analisis regresi linier berganda	Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan observasi langsung ke lokasi penelitian. Secara parsial ini menunjukkan bahwa prinsip GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan prinsip independensi dan tanggung jawab tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2.	Desna Arini (2010)	Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri	Analisis <i>Rank Spearman</i>	Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3.	Allina Addiyah (2014)	Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012)	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.	Eko Sunarwan (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Entitas Perbankan di Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).	<i>purposive sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA) dan independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan diukur <i>Return On Asset</i> (ROA)
5.	Rizky Amalia (2014)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	pengumpulan data sekunder dengan teknik <i>purposive sampling</i> atau <i>judgement sampling</i>	Dari hasil uji regresi linear berganda variabel syariah compliance (X1) dan audit review (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA (X1) dan ROE(X2) ROA dan ROE.Uji F menunjukkan pengaruh signifikan secara keseluruhan.

C. Kerangka Pikir

Berlandaskan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1

KERANGKA PIKIR

Good corporate governance sebagai variabel independen yang diukur dengan indikator ukuran Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan indikator *ROA* dan *ROE*.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas di duga bahwa *Prinsip Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar Jl. Sam Ratulangi No. 12 Makassar, Ujung Pandang, Mangkura, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2017.

B. Populasi Dan Sampel

Sugiyono (2010 : 115) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel, menurut Sugiyono (2010 : 116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar sebanyak 80 orang. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teori Slovin (Suswanto, 2014) dengan menggunakan formulasi rumus yaitu sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

$$n = 80 / (1 + 80(0,1)^2)$$

$$n = 80 / (1 + 80(0,01))$$

$$n = 80 / 1,8$$

$$n = 44$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

berdasarkan formulasi rumus dari teori Slovin maka jumlah sampel yang akan diteliti sebesar 44 sampel.

C. Definisi Operasioanal Variabel

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan, maka terdapat dua variabel yang akan di analisis, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel X)

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengaruh prinsip GCG dalam perusahaan bank, prinsip ini terdiri atas Transparansi, Pertanggungjawaban, Akuntabilitas, Profesional, Dan Kewajaran.

- a. *Good Corporate Governance (GCG)* *Good corporate governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Adapun prinsip *good corporate governance*:

- 1) Transparansi, Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas, Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
- 3) Pertanggungjawaban, Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Kemandirian, Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi

merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

- 5) Kewajaran, Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen atau variabel terkait menurut Indriantoro (2002;63), yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Independen. Yang menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh prinsip GCG yaitu Kinerja Keuangan. Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka. Dalam hal ini data dan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau data yang bersifat non angka antara lain, sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data teoritis dan penelitian lapangan berupa observasi dan kuesioner secara langsung dengan pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai bahan-bahan literature yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam pembahasan ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data melalui :

1. Penelitian pustaka (Library Reserch) yakni pengumpulan data teoritis dengan mempelajari/menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan (Field Reserch) yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan cara :
 - a. Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan angket atau daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Pengukuran variable dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan bobot score atau kriteria penilaian : 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

b.Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini pegawai pada Bank Muamalat.

F.Metode Analisis Data

Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang memerlukan perhitungan statistic dan matematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis digunakan program SPSS. Adapun alat-alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua variable, peneliti menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan 1 variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya variable tergantung (Sarwono, 2006) Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variable dependant (variable Y), nilai variable dependant berdasarkan nilai independent (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan analisis regresi linier maka akan mengukur perubahan variabel bebas. Analisis regresi linier dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh prinsip GCG dengan kinerja keuangan dilakukan dengan rumus regresi linier sederhana, yaitu sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Respon (Dependen)

X = Variabel Prediktor atau Variabel Faktor Penyebab (Independen)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (kemiringan) besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor

2. Pengujian Hipotesis

Uji t (Pengujian Secara Terpisah/Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan taraf nyata 5%. Selain itu berdasarkan nilai t, maka dapat diketahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011:49).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 *Rabiul Tsani* H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 *Syawal* 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp.84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen

korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembayaran macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setipa Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesi, 1996 ATM, serta 95.000 *merchant* debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari

2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *share gold* dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh *merchant* berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

“ The Best Islamic Bank And Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence”.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia

yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Adapun Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

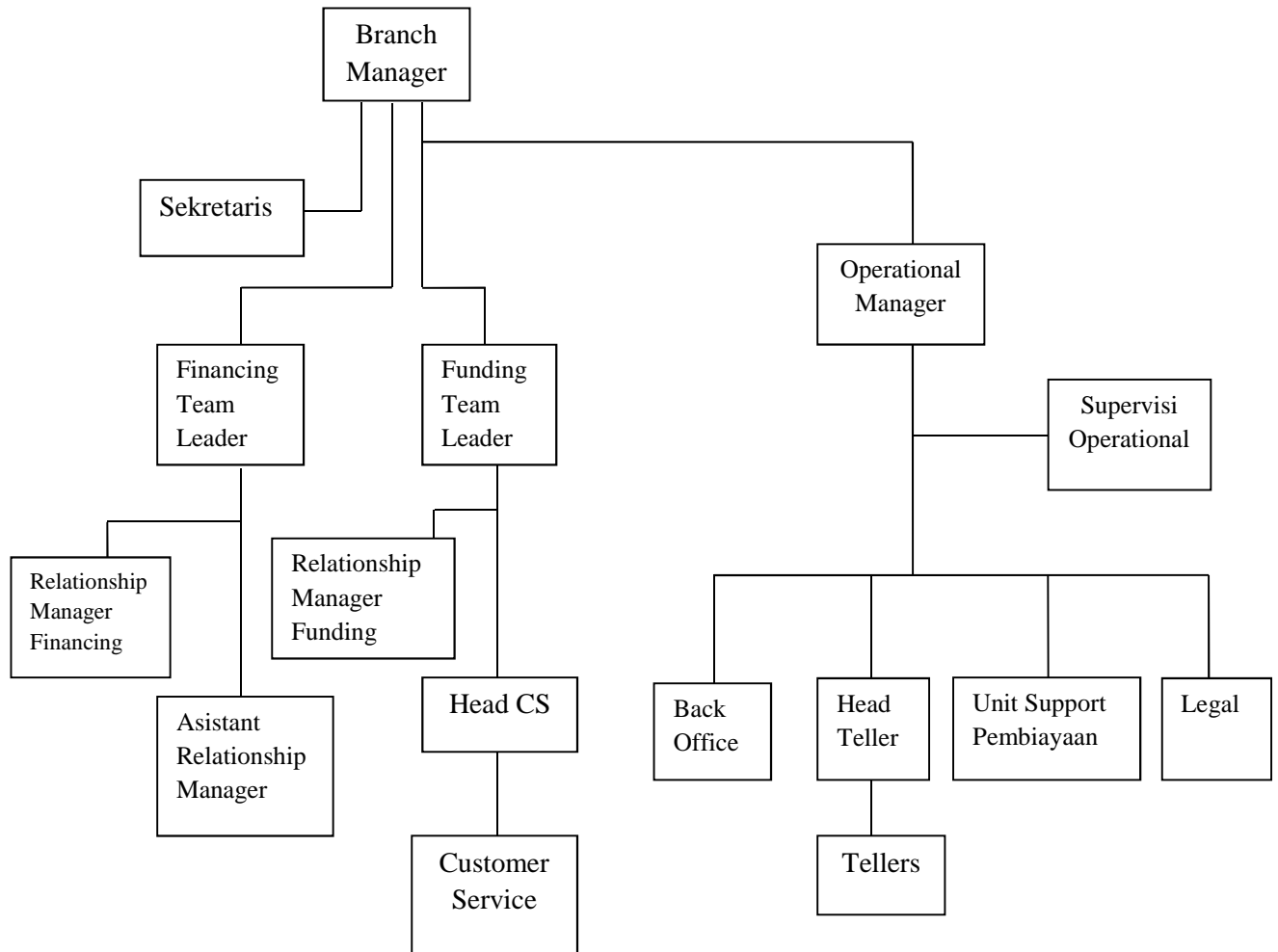
1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kualitas kegiatan usaha.
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja.
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat bahwa sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Mendidik dan bimbingan masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

D. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BANK MUAMALAT, TBK. CABANG MAKASSAR



Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI

E. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Bank Konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Didasarkan pada prinsip *syariah*. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip *syariah* memiliki berbagai variasi *akad* yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk Bank Konvensional. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diantaranya adalah.

1. Pendanaan, terdiri dari.
 - a. Giro *Wadiah* yang terdiri dari giro perorangan dan giro institusi.
 - b. Tabungan, yang terdiri dari:
 1. Tabungan Muamalat Reguler merupakan tabungan *syariah* dalam mata uang rupiah, dengan *akad mudharabah mutlaqah* (bagi hasil).
 2. Tabungan *E-Gold* Debit merupakan tabungan *syariah* dalam mata uang rupiah, dengan *akad mudharabah mutlaqah* (bagi hasil).
 3. Tabungan Muamalat Prima tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan Deposito.

4. Tabungan Wisata merupakan sebuah tabungan rencana yang didesain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.
 5. Tabungan Haji *Arafah Plus* merupakan Tabungan Haji dalam mata uang Rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat Muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara regular maupun *plus*.
 6. Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan berencana dalam mata uang Rupiah yang akan membantu mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh.
- c. Deposito yang terdiri dari:
1. Deposito *Mudharabah* merupakan Deposito *syariah* dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.
 2. Deposito *Fulinves* merupakan Deposito *syariah* dalam mata uang Rupiah dan *US dollar* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis.
2. Pembiayaan, terdiri dari:
- a. Konsumen yang terdiri dari.

1. Pembiayaan Hunian *Syariah* merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip *syariah* dengan dua pilihan yaitu akad *Murabahah* (jual-beli) atau *Mutanaqishah* (kerjasama sewa).
2. AutoMuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip *syariah* *murabahah* (jual-beli).
3. Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu konsumen mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Produk ini berdasarkan prinsip *syariah* dengan *akad al-qardh* (pinjaman).
4. Pembiayaan *Muamalat Umroh* adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera. Produk ini berdasarkan prinsip *syariah* dengan *akad ijarah* (sewa jasa).
5. Pembiayaan Anggota Koperasi adalah produk pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/ guru/ PNS (selaku *end user*) melalui koperasi. Produk ini berdasarkan prinsip *syariah* dengan *akad mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan koperasi atas pendapatan margin pembiayaan *murabahah* (jual beli) dari yang disalurkan kepada anggota.

- b. Investasi yang terdiri dari.
 - 1. Pembiayaan Investasi merupakan produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah* dengan *akad murabahah* atau *ijarah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi.
 - 2. Pembiayaan Hunian *Syariah* Bisnis merupakan produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah* dengan dua pilihan yaitu *akad murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa).
- c. Modal kerja yang terdiri dari.
 - 1. Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan prinsip *syariah* dengan pilihan *akad musyarakah*, *mudharabah*, atau *murabahah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
 - 2. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* (LKMS) adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKMS (BPRS/ BMT/ Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya (*end-user*). Produk ini menggunakan prinsip *syariah* dengan *akad mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 3. Pembiayaan Rekening Koran *Syariah* adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai

kebutuhan dan kemampuan. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving.

3. Layanan, terdiri dari.
 - a. *International Banking*, terdiri dari:
 1. *Remittance* yang mencakup *Remittance* BMI – Bank, BMI – BMMB, BMI – NCB, dan Tabungan Nusantara.
 2. *Trade Finance* yang mencakup Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor Impor *Non LC Financing*, SKBDN, *Letter of Credit, Standby LC*.
 3. *Investment Service*.
 - b. Transfer
 - c. Layanan 24 jam, terdiri dari:
 1. *SMS Banking*
 2. *SalaMualamat*
 3. *MuamalatMobile*
 4. *Internet Banking*
 5. *PC Banking*

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, dalam penelitian responden yang berjenis kelamin laki-laki dominan dibandingkan perempuan yaitu sebanyak 26 pegawai (59,1%)

Tabel 5.1
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	26	59.1	59.1	59.1
	Perempuan	18	40.9	40.9	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2017)

b. Karakteristik responden berdasarkan umur responden

Dalam data mengenai umur responden, dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Adapun data mengenai umur pegawai PT. Bank Muamalat Tbk, Cabang Makassar yang di ambil sebagai berikut:

Tabel 5.2

Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21	2	4.5	4.5	4.5
	22	3	6.8	6.8	11.4
	24	3	6.8	6.8	18.2
	25	3	6.8	6.8	25.0
	26	2	4.5	4.5	29.5
	28	1	2.3	2.3	31.8
	30	4	9.1	9.1	40.9
	31	3	6.8	6.8	47.7
	32	2	4.5	4.5	52.3
	34	2	4.5	4.5	56.8
	35	1	2.3	2.3	59.1
	38	1	2.3	2.3	61.4
	39	2	4.5	4.5	65.9
	42	1	2.3	2.3	68.2
	43	1	2.3	2.3	70.5
	44	3	6.8	6.8	77.3
	45	4	9.1	9.1	86.4
	46	2	4.5	4.5	90.9
	47	2	4.5	4.5	95.5
	50	2	4.5	4.5	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2017

Berdasarkan usia responden, dalam penelitian ini responden yang memiliki usia antara 30-45 tahun lebih dominan dibandingkan rentang usia lainnya yaitu sebanyak 8 orang pegawai (18,2%)

2. Uji T (Uji Parsial)

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh secara terpisah dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) berdasarkan hasil regresi yang ada pada tabel 5.3 uji t dilakukan dengan membandingkan

nilai t hitung dengan tingkat kesalahan 10% . apabila t hitung $>$ t tabel maka dapat disimpulkan variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan .

Tabel 5.3

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.921	1.626		1.182	.244
	GCG	.589	.028	.957	21.264	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel dimana t hitung hasil perhitungan SPSS diperoleh $21,264 > 2,018$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$ gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Tbk, Cabang Makassar.

B. Pembahasan

1. *Good Corporate Governance (GCG) Good corporate governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Adapun prinsip *good corporate governance*:

- a) **Transparansi**, Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

- b) Akuntabilitas, Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
 - c) Pertanggungjawaban, Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
 - d) Kemandirian, Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif.
 - e) Kewajaran, Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

3. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel dimana t hitung hasil perhitungan SPSS diperoleh $21,264 > 2,018$ dan signifikasi $0,001 < 0,05$ gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Tbk, Cabang Makassar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Good Corporate Governance merupakan *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merujuk pada seperangkat perusahaan di arahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lain (misalnya karyawan, pemasok dan masyarakat pada umumnya).
2. Prinsip-prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian, dan kewajaran.
3. Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.
4. Terdapat hubungan positif antara prinsip good corporate governance dan kinerja keuangan dibuktikan dengan nilai t (21,264) lebih besar dari tabel (2,018) ini berarti apabila good corporate governance berjalan dengan baik secara signifikan maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

B. Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. GCG merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kinerja perusahaan, karena dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkatkan. Oleh karena itu sebaiknya bank harus selalu meningkatkan mutu dari penerapan GCG tersebut.
2. Agar kinerja keuanganyang maksimal dapat tercapai Bank harus meningkatkan kualitas daripada penerapan prinsip GCG, dan selain itu perusahaan harus bisa mengembangkan dan menerapkan prinsip GCG itu secara berkala dengan sangat baik untuk dapat meraih hasil yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adayani, W. dan Purwanti, L. (2006). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Textile Mill Product Dan Apparel And Other Textile Product Yang Terdaftar Di BEJ*. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* Vol. 5, No. 1. Hal: 1-7.
- Addiyah, Allina. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Arani, Desna. 2010. *Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri*. *Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Arriyanto, Kresnohadi. *Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usaha*, (Majalah Usahawan No. 10 Tahun XXIX, 2000), h 9.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prentice Hall.
- Hardikasari, Eka. 2011. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Hastuti, Theresia Dwi. 2005. *Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan*. SNA VII Solo.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Jensen, M. and Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, pp. 305-60
- Klapper, L, dan Love. 2002. *Corporate Governance, investor Protection and Performance in Emerging Markets*. *World Bank Working Paper*, hal 23-64.
- Lukman. 2010. Penerapan Sistem Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan. www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistem-syariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/. [15Mei 2017]

- Macey, J., and M. O'Hara. (2003). *The Corporate Governance of Banks, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy*. Review 9, no. 1 (April): 91- 107.
- Mappaselle. 2013. *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palopo)*. Skripsi. Universitas Makassar. Tidak Dipublikasikan.
- Nuswandari, Cahyani. (2009). *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 16, No. 2. Hal: 70-84.
- OECD. (2004). *OECD Principle of Corporate Governance*. www.oecd.org/daf/governance/principle/html. [12 Maret 2017]
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 *Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 *tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah*.
- Purwaningtyas, F. S. (2011). *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris 46 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2009)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 - 2007*. Tesis S2. Magister Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Sayidah, Nur. 2007. *Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005)*. JAAI, Vol. 11, No. 1. Hal: 1-9.

Siswanto Sutojo dan Aldridge, E. John. 2005. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta : PT. Damar Mulia Rahayu.

Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Entitas Perbankan di Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia). Skripsi www.repository.uinjkt.ac.id/. [15 Juni 2017].

Wibowo, Ari. 2009. *Membangun Perbankan Syari'ah Menuju Good Corporate Governance*. www.pesantren.uui.ac.id. [12 Mei 2017]

www.bankmuamalat.co.id

www.fcgi.or.id)meliputi

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Naimah Ikram, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Oktober 1995, anak ke-dua dari empat bersaudara, buah kasih pasangan Muh. Ikram dan Tukiye. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Inpres Pannara pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007 di SDN 101 Banyuurip Luwu Utara. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Makassar dan tamat pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Makassar dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur SPMB pada tahun tersebut. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 (strata satu) pada tahun 2018.